

## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1.1. Aspek geografi dan demografi

#### 2.1.1.1. Kondisi Geografis Dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bima merupakan salah satu wilayah Nusa Tenggara Barat yang berada pada bagian timur Pulau Sumbawa dengan koordinat Lintang Selatan antara 8°20'-8°30' dan antara 118°41' - 118°48' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Kota Bima**

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
I.	Kecamatan Rasanae Barat	1. Kel. Tanjung	0,79
		2. Kel. Paruga	0,91
		3. Kel. SaraE	0,48
		4. Kel. NaE	0,31
		5. Kel. Pane	0,31
		6. Kel. Dara	7,34
Jumlah I			10.14
II.	Kecamatan Mpunda	1. Kel. Sambinae	5,43
		2. Kel. Panggi	3,51
		3. Kel. Monggonao	0,63
		4. Kel. Manggemaci	0,52
		5. Kel. Penatoi	0,74
		6. Kel. Lewirato	0,49
		7. Kel. Sadia	0,68
		8. Kel. Mande	0,69
		9. Kel. Santi	0,72
		10. Kel. Matakando	1,87
Jumlah II			15.28
III.	Kecamatan Raba	1. Kel. Penaraga	0,74
		2. Kel. Penanae	5,34

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		3. Kel. Rite	1,84
		4. Kel. Rabangodu Utara	0,98
		5. Kel. Rabangodu Selatan	1,43
		6. Kel. Rabangodu Timur	0,54
		7. Kel. Rabangodu Barat	1,66
		8. Kel. Rontu	4,74
		9. Kel. Ntobo	31,19
		10. Kel. Kendo	9,08
		11. Kel. Nitu	6,19
<b>Jumlah III</b>			<b>63,73</b>
IV.	Kecamatan Asakota	1. Kel. Melayu	0,76
		2. Kel. Jatiwangi	18,91
		3. Kel. Jatibaru	17,18
		4. Kel. Kolo	26,49
		5. Kel. Ule	3,27
		6. Kel. Jatibaru Timur	2,42
<b>Jumlah IV</b>			<b>69,03</b>
V.	Kecamatan Rasanae Timur	1. Kel. Kumbe	
		2. Kel. Lampe	7,23
		3. Kel. Oi Fo'o	9,20
		4. Kel. Kodo	5,55
		5. Kel. Dodu	7,93
		6. Kel. Lelamase	21,05
		7. Kel. Nungga	11,59
		8. Kel. Oimbo	2,74
<b>Jumlah V</b>			<b>64,07</b>
<b>Jumlah I + II + III + IV + V</b>			<b>222,25</b>

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2018

### 2.1.1.2. Topografi

#### a. Ketinggian

Wilayah Kota Bima umumnya didominasi oleh dataran rendah dimana daerah yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl seluas 14.236 ha atau mencapai 65,52 persen dari luas Kota Bima. Sementara itu luas tanah dengan ketinggian 25-50 m seluas 4.534 ha (20,87%) dan di atas 50 m seluas 2.957 ha (13,63%).

**Tabel 2.2.**  
**Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut**

Tinggi Rata-rata dari Permukaan	Luas Tanah	Persentase Terhadap Luas Kota Bima (%)
0 - 25	14.236	65,52
25 - 50	4.534	20,87
> 50	2.957	13,63
<b>Jumlah</b>	<b>21.727</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2018

b. Kelerengan

Untuk tahun 2017, Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan datar dengan kelerengan 0-2<sup>0</sup>, yaitu seluas 9.242 ha, kemudian lahan bergelombang seluas 4.994 ha. Hal ini menjadi potensi dalam melaksanakan pembangunan fisik dan kawasan budidaya karena didukung oleh kondisi topografi yang memadai. Adapun lahan dengan kondisi sangat curam dengan luas 2.957 ha dapat difungsikan sebagai kawasan lindung.

**Tabel 2.3.**  
**Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima**

No	Kecamatan	Datar (0 - 2 <sup>0</sup> )	Bergelombang (2 - 15 <sup>0</sup> )	Curam (15 -	Sangat (> 40 <sup>0</sup> )
1	Rasanae Barat	854	35	75	50
2	Mpunda	658	132	563	175
3	Rasanae Timur	2.555	1.793	935	1.024
4	Raba	2.950	1.850	848	627
5	Asakota	2.225	1.184	2.113	1.081
<b>J u m l a h</b>		<b>9.242</b>	<b>4.994</b>	<b>4.534</b>	<b>2.957</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Wilayah Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengan > 40<sup>0</sup> mencapai 39,07%. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40<sup>0</sup> mencapai 44,36%. Sebaliknya, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda didominasi wilayah yang relatif datar dan bergelombang. Sementara itu, 29,91% dari wilayah KecamatanAsakota memiliki karakteristik kelerengan bergelombang.

### **2.1.1.3.Klimatologi**

Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2017 sebesar 147,92 mm<sup>3</sup>/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan September yaitu 263,0 mm<sup>3</sup> dan terendah pada bulan Agustus, yaitu 39,0 mm<sup>3</sup>. Rata-rata hari hujan selama tahun 2017 tercatat 14 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Februari yaitu 24 hari dan terendah pada bulan Juli dan September sebanyak 6 hari hujan.

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2017 sebesar 85,08%, tertinggi 90% pada Bulan Desember dan terendah 79% pada Bulan November. Temperatur berkisar pada interval antara suhu minimal 22,40°C pada Bulan Agustus dan suhu maksimum 34,90°C pada Bulan Oktober, dengan rata-rata suhu 27,47°C. Kondisi iklim menunjukkan gejala suhu yang semakin panas dibanding dengan tahun sebelumnya yang rata-rata suhu hanya mencapai 27,13°C. Dengan demikian terjadi isu perubahan iklim yang lebih cepat dan perlu disikapi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 2.4**  
**Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2017**

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	160,0	20	69
Pebruari	156,0	24	55
Maret	148,0	19	67
April	119,0	16	78
Mei	51,0	11	81
Juni	114,0	14	72
Juli	142,0	6	75
Agustus	39,0	7	88
September	263,0	6	85
Oktober	143,0	11	75
Nopember	240,0	11	72
Desember	200,0	20	37
<b>Rata-Rata</b>	<b>147,92</b>	<b>14</b>	<b>71,17</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

**Tabel 2.5**  
**Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kota Bima Tahun 2017**

Bulan	Suhu Udara (°C)			Lembab Nisbi (%)	Tekanan Udara(mb)
	Rata-rata	Max	Min		
1. Januari	28,30	34,10	24,90	85,00	1012,00
2. Pebruari	27,70	33,00	25,20	88,00	1011,40
3. Maret	28,00	33,10	25,30	88,00	1011,80
4. April	27,90	33,70	24,70	88,00	1011,60
5. Mei	27,20	33,70	24,80	86,00	1011,30
6. Juni	27,30	33,00	23,70	85,00	1012,30
7. Juli	26,30	31,70	23,00	87,00	1012,20
8. Agustus	26,40	32,40	22,40	83,00	1014,70
9.	27,60	34,20	23,60	82,00	1014,70
10. Oktober	28,40	34,90	24,30	80,00	1011,50
11.	26,40	34,70	24,70	79,00	1010,60
12.	28,10	33,20	25,60	90,00	1008,90
<b>Rata-Rata</b>	<b>27,47</b>	<b>33,48</b>	<b>24,35</b>	<b>85,08</b>	<b>1011,92</b>

*Sumber : BPS Kota Bima 2018*

#### **2.1.1.4. Geologi**

Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi dan berdasarkan morfometri dan morfogenesis dapat dikelompokkan ke dalam 4 satuan geomorfologi, yaitu:

1. Satuan geomorfologi dataran fluvial.

Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan di sekitarnya dan Teluk Bima yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Bima memanjang dari Barat ke Timur melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm 20\%$  dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Raba Ngodu, Raba Dompou, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata – rata 3 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung.

2. Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai

Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm 10\%$  dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian barat Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai, meliputi: daerah Tanjung, Melayu dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai ini memiliki nilai beda tinggi rata – rata 2 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir.

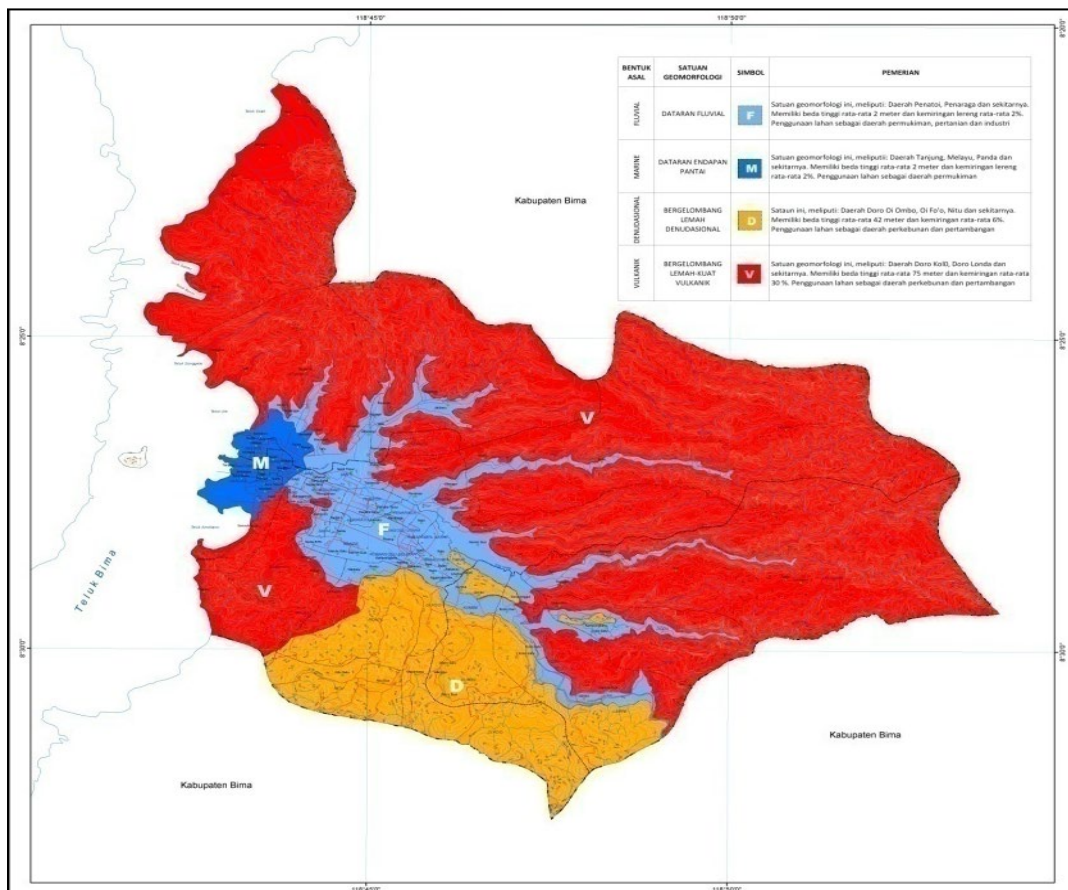
3. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua, batuan sedimen dan setempat-setempat oleh batu gamping koral. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm 30\%$  dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima.

Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional, meliputi: daerah Doro Oi'ombo, Doro Oi'si'i, Doro Jati Oi' Fo'o, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata – rata 42 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 6 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batu gamping dan batu pasir.

4. Satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati ±40% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kolo, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata – rata 75 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 13 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.



**Gambar 2.1. Geomorfologi Kota Bima**

### 2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.

**Tabel 2.6.**  
**Sungai di Kota Bima**

Nama Sungai		Panjang Sungai (km)	Lebar Sungai (m)	Kecamatan	
				Hulu	Hilir
1	Sungai Lampe	25	30	Rasanae Timur	Rasanae Barat
2	Sungai Dodu	12	20	Rasanae Timur	Rasanae Timur
3	Sungai Nungga	22	20	Rasanae Timur	Mpunda
4	Sungai Kendo	15	15	Raba	Rasanae Barat
5	Sungai Ntobo	12	15	Raba	Rasanae Barat
6	Sungai Jatiwangi	16	12	Asakota	Asakota
7	Sungai Romo	2	2,5	Asakota	Asakota

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2018*

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota. Mata air ini sebagian sudah dimanfaatkan oleh warga sebagai air baku air minum dan untuk mata air dengan debit yang besar telah dimanfaatkan oleh PDAM sebagai sumber air baku.

### 2.1.1.6. Kondisi Demografis

*a. Jumlah Penduduk*



Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2017 mencapai 166.407 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 81.725 jiwa dan perempuan sebanyak 84.682 jiwa.

**Tabel 2.7.**  
**Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2017**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Rasanae Barat	18.602	19.418	38.020
2.	Mpunda	19.208	19.869	39.077
3.	Raba	20.167	20.932	41.099
4.	Rasanae Timur	8.627	8.739	17.366
5.	Asakota	15.121	15.724	30.845
Jumlah Total		81.725	84.682	166.407

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

b. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 46.772 jiwa atau 28,11%. Sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 111.459 jiwa atau 66,98% dan kelompok usia non produktif (65 tahun keatas) berjumlah 8.176 jiwa (4,91%).

**Tabel 2.8.**  
**Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2017**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8.148	7.755	15.903

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
5-9	8.015	7.793	15.808
10-14	7.640	7.421	15.061
15-19	8.425	8.550	16.975
20-24	9.225	9.096	18.321
25-29	6.936	6.783	13.719
30-34	6.158	6.775	12.933
35-39	5.460	5.922	11.382
40-44	5.174	5.968	11.142
45-49	4.462	4.840	9.302
50-54	3.594	3.862	7.456
55-59	2.874	3.269	6.143
60-64	1.884	2.202	4.086
65-69	1.494	1.621	3.115
70-74	982	1.160	2.142
75+	1.254	1.665	2.919
<b>Jumlah</b>	<b>81.725</b>	<b>84.682</b>	<b>166.407</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Dari data komposisi penduduk menurut kelompok umur ini diketahui rasio ketergantungan total adalah sebesar 33,02 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 33 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 33,02 persen ini

disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun) sebesar 28,11 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua (perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun) sebesar 4,91 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2017, penduduk usia kerja di Kota Bima masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

#### c. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kota Bima tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA/ sederajat yang mencapai 42.078 jiwa atau sebesar 25,29 persen dari total penduduk. Angka penduduk berpendidikan rendah yang merupakan tamatan SD sampai SLTP sederajat mencapai 33.391 jiwa atau 20,07 persen. Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi diploma sebesar 3.518 atau 2,11 persen dan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi sarjana dan pasca sarjana sebesar 12.075 atau 7,26 persen, dimana 14 diantaranya adalah berpendidikan S3 (Doctor) dan sebanyak 518 berpendidikan S2 (Master). Sedangkan jumlah penduduk yang tidak menamatkan SD masih sangat tinggi yaitu sejumlah 20.646 jiwa atau 12,41 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk yang belum/tidak bersekolah sebanyak 32.096 jiwa atau 19,29 persen.

#### d. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk

Indikator penting untuk melihat persebaran penduduk adalah rasio kepadatan penduduk (*density ratio*), yang sangat berkaitan erat dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.

Berdasarkan persebaran penduduk, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 3.750 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan jumlah kepadatan 271 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.9.**  
**Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima**  
**Tahun 2013 – 2017 (Jiwa/km<sup>2</sup>)**

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasanae Barat	3.200	3.367	3.599	3.675	3.750
2	Mpunda	2.218	2.333	2.459	2.511	2.557
3	Raba	571	600	619	632	645
4	Rasanae Timur	264	277	261	266	271
5	Asakota	421	443	427	437	447
<b>Jumlah</b>		<b>669</b>	<b>704</b>	<b>718</b>	<b>734</b>	<b>749</b>

*Sumber : BPS Kota Bima, 2018*

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat persebaran penduduk yang tidak merata diantara wilayah khususnya antara wilayah bagian barat dan bagian timur wilayah Kota Bima. Hal ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi kawasan tersebut, dimana pada bagian barat merupakan kawasan sub pusat perdagangan dan jasa sedangkan dibagian timur merupakan kawasan pertanian dan kawasan konservasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kota Bima sehingga persebaran penduduk akan terdistribusi secara merata.

#### **e. Pencatatan Sipil**

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran. Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah penduduk Kota Bima yang memiliki KTP-Elektronik dan telah melakukan penyerapan/perekaman KTP-Elektronik adalah 92.852 jiwa atau 95.62%. Kepala keluarga di Kota Bima, yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 38.237 atau 97.38 %. Jumlah pencatatan kelahiran tahun 2017 yaitu sebanyak 52.359 jiwa.

**Tabel 2.10.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir**  
**Tahun 2013 -2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Wajib KTP					97.107
Jumlah Penduduk sudah cetak KTP					92.852
Rasio Penduduk ber-KTP					95,62 %
Jumlah Penduduk ber-akte lahir					52.359
Jumlah KK	37.187	39.020	39.242	39.290	39.304
Sudah Cetak KK					38.273
Rasio Kepemilikan KK					97,38 %

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018*

#### **f. Ketenagakerjaan**

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun).

Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 86.954 Jiwa. Angkatan kerja laki-laki sebanyak 48.379 jiwa atau lebih besar dibandingkan jumlah angkatan kerja perempuan yang hanya sejumlah 38.575 jiwa. Dari jumlah tersebut, 96,49 persen angkatan kerja sudah bekerja sedangkan 3,51 persen menganggur. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja adalah sebesar 33.224 Jiwa yang terdiri dari penduduk yang masih sekolah sebanyak 10.357 jiwa dan penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 20.253 jiwa dan penduduk dengan kegiatan lainnya 2.614 jiwa.

**Tabel 2.11.**  
**Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 THN (JIWA)	90.832	101.980	114.688	117.003	120.178
2	ANGKATAN KERJA (JIWA)	60.706	68.947	76.867	80.768	86.954
	Bekerja	51.084	60.133	69.063	76.164	83.905
	Pengangguran/TPT	9.622	8.814	7.804	4.604	3.049
3	BUKAN ANGKATAN KERJA (JIWA)	30.126	33.033	37.821	36.235	33.224
	Sekolah	9.706	10.510	11.609	11.215	10.357
	Mengurus RT (%)	18.376	20.367	22.566	21.876	20.253
	Lainnya (%)	2.044	2.156	3.646	3.144	2.614

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2017 didominasi oleh 4 (empat) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor jasa adalah yang paling dominan yaitu mencapai 31,65 persen. Lapangan pekerjaan selanjutnya pada sektor perdagangan yaitu sebesar 27,41 persen, sektor lain sebesar 16,26 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 13,37 persen.

Sementara penduduk yang bekerja di sektor Perindustrian tercatat dengan persentasenya hanya 11,32 persen.

**Tabel 2.12.**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2013 - 2017**

<b>Lapangan Pekerjaan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan			9.232		11.303
2. Pertambangan dan Penggalian			768		5.145
3. Industri Pengolahan			7.818		8.015
4. Listrik, Gas dan Air			161		703
5. Bangunan			4.310		6.750
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel			18.929		18.314
7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi			3.943		4.835
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan			2.045		3.186
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan			21.857		25.654
<b>J u m l a h</b>			<b>69.063</b>		<b>83.905</b>

*Sumber : BPS Kota Bima, 2018*

Data di atas menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan lapangan pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah sebagai sebuah kota meskipun sektor pertanian dalam arti luas juga masih memberikan kontribusi yang cukup besar.

Pertumbuhan sektor Perdagangan dan Jasa ini pada dasarnya didukung oleh keberadaan Pelabuhan Laut Bima serta fungsi wilayah Kota Bima dalam struktur



ruang regional sebagai sub pusat pertumbuhan di bagian timur Provinsi NTB. Oleh karena itu, pengembangan kota diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat koleksi dan distribusi.

#### **2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah Kota Bima dalam pembahasannya mengacu pada arahan rencana penataan ruang Wilayah Kota Bima yang meliputi potensi pengembangan kawasan lindung dan kawasan Budidaya.

##### **A. Kawasan Lindung.**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam serta sumberdaya buatan guna pembangunan berkelanjutan. Jenis kawasan lindung yang direncanakan berdasarkan RTRW adalah sebagai berikut:

1. *Kawasan Hutan Lindung*
2. *Kawasan perlindungan setempat;*
  - Sempadan pantai;
  - Sempadan sungai;
  - Waduk;
  - Kawasan sekitar mata air.
3. *Kawasan rawan bencana alam;*
  - Kawasan rawan gempa;
  - Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
  - Kawasan rawan bencana banjir;
  - Kawasan rawan bencana tsunami;
  - Kawasan rawan bencana gelombang pasang;
4. *Kawasan Cagar Budaya*
5. *Kawasan RTH*

## **B. Kawasan Budidaya**

### **1. Kawasan Hutan Produksi**

Hutan produksi yaitu hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi dan yang sengaja dikelola oleh manusia. Hutan produksi terbagi menjadi menjadi dua yaitu hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

- Hutan Produksi Terbatas

Adapun peruntukan untuk hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur dengan luas keseluruhan 1.497,00 Ha, yang meliputi hutan Maria (RTK.25), di Kecamatan Rasanae Timur dengan luas 627,00 Ha dan hutan Nanganae Kapenta (RTK.68) seluas 870,00 Ha.

- Hutan Produksi Tetap

Untuk peruntukan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda dengan luasan sebesar 1.258 Ha, yang terdiri dari 1.010 Ha hutan Donggomasa (RTK.67) dan 248,00 Ha hutan Nanganae Kapenta (RTK.68).

### **2. Kawasan Peruntukan Perumahan**

Rencana pengembangan perumahan di Kota Bima seluas 1.255 Ha diklasifikasikan dengan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi diarahkan di kawasan pusat kota dan sekitarnya meliputi Kelurahan Melayu, Tanjung, Paruga, Dara, Sarae, Nae, Monggonao, Manggemaci, Pane, Penatoi, Lewirato, Mande, Santi, Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Rabangodu Utara, Penaraga, dan Kelurahan Sadia. Perumahan dengan kepadatan sedang diarahkan di kawasan sub pusat kota dan sekitarnya, meliputi kelurahan Sambinae, Panggi, Rontu, Kumbe, Jatiwangi, Jatibaru, Matakando, Rite, Penanae, dan Rabangodu Selatan. Perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan di kawasan pinggiran kota meliputi Kelurahan Kolo, Ntobo, Kendo, Nungga, Lelamase, Dodu, Lampe, Oi Fo'o, Nitu, dan Kodo.

### **3. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**

Perkembangan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Bima keberadaannya memusat di pusat kota, tetapi ada indikasi berkembang secara linier pada jalan-jalan

utama kota. Kegiatan perdagangan di wilayah Kota Bima semakin berkembang dan meningkat. Dalam skala regional keberadaan Kota Bima adalah sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan skala regional. Sehingga keberadaan Kota Bima mempunyai arti yang sangat penting dan perlu diarahkan secara tetap dan memenuhi sasaran. Sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan Kota Bima maka rencana pengembangan kawasan komersial yang ada di Kota Bima adalah sebagai berikut:

- Untuk pusat perbelanjaan berupa pasar raya Bima sebagai pasar grosir. Kegiatan perdagangan ini perlu dilengkapi dengan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, tempat sampah dan perlengkapan kebersihan lainnya. Pusat perbelanjaan berupa plasa dan pasar swalayan di Kota Bima perlu dikembangkan mengingat kecenderungan perkembangan Kota Bima yang semakin pesat. Mengingat keberadaan pasar swalayan ini mempunyai daya tarik yang besar, maka untuk pengembangan yang akan datang diusahakan berada pada kawasan yang baru, seperti di sekitar pusat perkantoran. Dengan demikian diharapkan kegiatan aktivitas kota tidak hanya memusat di pusat kota saja, tetapi mampu berkembang secara merata di seluruh wilayah Kota Bima. Salah satu upaya lain yang perlu diperhatikan adalah mengusahakan keberadaan pasar swalayan dan Plasa ini tidak mengganggu keberadaan pasar tradisional yang ada. Untuk kegiatan perdagangan campuran, seperti garment/konveksi, elektronik, dealer motor, biro perjalanan, jasa seperti bank berkembang secara linier yaitu mulai dari Sultan Hasanuddin, Jalan Sultan Kaharuddin, dan Jalan Gajah Mada serta Jalan Jenderal Soedirman, Pengembangan perdagangan dan jasa ini perlu dibatasi, mengingat keberadaan kawasan perdagangan ini sudah padat dan tidak adanya tempat parkir yang memadai. Sehingga yang perlu dilakukan pada kawasan perdagangan dan jasa ini adalah pengaturan parkir dengan sistem parkir parallel dan parkir menyudut untuk memenuhi kebutuhan parkir pengunjung di kawasan tersebut.

#### **4. Kawasan Peruntukan Perkantoran**

Rencana kawasan peruntukan perkantoran di Kota Bima yaitu untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta dengan

luas kawasan sebesar 46 Ha, adapun sebaran kawasan peruntukan perkantoran yaitu berada pada Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia, Kelurahan Lewirato, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Menggemaci, Kelurahan Paruga, dan Kelurahan Dara.

## **5. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan**

*Lokasi Pengembangan Kawasan industri dan pergudangan di Kota Bima direncanakan:*

- Pengembangan Kawasan industri marmer dengan skala nasional dan internasional berlokasi di Kelurahan Oi Fo'o dan sekitarnya dengan luasan 46,94 Ha.
- Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Tanjung, industri garam rakyat di Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga, dan industri pengolahan hasil pertanian di Kelurahan Jatiwangi dengan luas sebesar 14 Ha.
- Pengembangan Kawasan industri kecil atau industri tenunan tradisional dengan skala regional dan local berlokasi di Kelurahan Ntobo, Kelurahan Nitu, Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Kumbe dan didukung oleh kegiatan industri tenun di seluruh kelurahan di kota.
- Adapun untuk pengembangan kawasan pergudangan dipusatkan di Lingkungan Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung, sampai Lingkungan Bina Baru Kelurahan Dara.

## **6. Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan wisata di sini didefinisikan sebagai keberkaitan beberapa obyek atau potensi wisata dalam satu keberkaitan yang umumnya jaraknya berdekatan. Sehingga kawasan wisata tidak didefinisikan sebagai obyek wisata, tetapi lebih pada adanya obyek dan potensi wisata disertai infrastruktur, pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata sebagai satu kesatuan sistem. Pengkajian ini didasarkan pada potensi yang ada, potensi yang akan datang atau potensi yang akan dikembangkan. Pengembangan wisata ini harus diikuti wisata andalan serta keberkaitan dengan wisata provinsi dan nasional. Rencana arahan lokasi Pengembangan Kawasan wisata di Kota Bima adalah:

- a. Pengembangan kawasan wisata alam (pantai/bahari) diarahkan pada

kawasan pesisir pantai Ni'u sampai Amahami Kelurahan Dara, kawasan pantai Kolo dan sekitarnya, dengan luas kawasan sebesar kurang lebih 72 Ha.

- b. Pengembangan kawasan pariwisata belanja khususnya produk kerajinan dilakukan di Kelurahan Ntobo, Kelurahan Rabadompu Timur dan Kelurahan Nitu.
- c. Pengembangan kawasan wisata budaya diarahkan di Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nitu, Kelurahan Ntobo dan Kelurahan Melayu.
- d. Pengembangan kawasan pariwisata religi diarahkan di Kelurahan Paruga dan Kelurahan Pane.
- e. Pengembangan kawasan wisata kuliner diarahkan di Kelurahan Dara, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, dan Kelurahan Manggemaci.

## **7. Kawasan Peruntukan Sektor Informal**

Peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal direncanakan dilakukan di areal kawasan perdagangan dan jasa, areal rekreasi sepanjang pantai Niu-Lawata-Amahami Kelurahan Dara, taman lapangan Pahlawan Raba, Kompleks Paruga Nae, Jalan Sulawesi, Jalan Flores, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Salahuddin, Jalan Mujair, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Martadinata, Jalan Gajah Mada.

## **8. Kawasan Peruntukan Pendidikan**

Berdasarkan kondisi saat ini kecenderungan perkembangan fasilitas pendidikan berada di pusat kota, sehingga perlu adanya pemerataan fasilitas pendidikan pada seluruh wilayah Kota Bima dan agar tidak terkonsentrasi di pusat kota saja. Kaitannya dengan arahan rencana pengembangan pendidikan menengah dan pendidikan dasar ini, lebih ditekankan pada pusat pelayanan lingkungan yang belum mempunyai fasilitas pendidikan maupun fasilitas pendidikannya masih kurang. Selain mengarahkan lokasi pendidikan ini, juga perlu adanya usaha-usaha yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, seperti dengan peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan belajar atau bahkan menciptakan pendidikan yang unggul. Pengembangan kawasan pendidikan dilakukan untuk melayani kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi skala regional, dan lokal. Adapun rencana pengembangan kawasan

pendidikan, diarahkan di Kelurahan Mande, Kelurahan Sadia, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Santi, Kelurahan Sarae, dan Kelurahan Rabangodu Utara, dengan luas kawasan kurang lebih sebesar 81,26 Ha.

### **9. Kawasan Peruntukan Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdayaguna. Dan untuk menunjang hal tersebut maka Ketersediaan fasilitas kesehatan sangat diperlukan, untuk melayani kesehatan seluruh penduduk di Kawasan Kota Bima atau Pulau Sumbawa Bagian Timur dengan skala regional maupun skala lokal.

Adapun untuk pengembangan kawasan kesehatan di Kota Bima, di arahkan di Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Nae, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, Kelurahan Penanae, Kelurahan Jatiwangi dan Kelurahan Kodo, dengan luas kawasan keseluruhan kurang lebih sebesar 15 Ha. Pengembangan kawasan peruntukan kesehatan dilakukan melalui antara lain: Pengembangan status Rumah Sakit dari tipe B menjadi tipe A, Pengembangan Puskesmas di tiap kecamatan, dan Pengembangan Posyandu di tiap Kelurahan.

### **10. Kawasan Peribadatan**

Bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama Islam, begitu pula dengan penduduk yang ada di wilayah Kota Bima yaitu mayoritas memeluk agama Islam. Jenis fasilitas peribadatan yang ada di Kota Bima seperti langgar/mushola, masjid, dan lain-lain keberadaannya menyebar di seluruh wilayah, dengan kecenderungan menyatu dengan permukiman penduduk. Dominannya pemeluk agama islam di Kota Bima tidak berarti mengesampingkan pemeluk agama lainnya, sehingga perlu penyediaan berbagai fasilitas peribadatan bagi pemeluk agama non islam, seperti gereja, Pura dan Vihara. Disamping itu adanya pemeluk agama non muslim ini tidak menjadikan toleransi antar pemeluk agama menjadi hilang akan tetapi semakin tinggi sifat toleransi antar pemeluk agama, hingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan skala nasional, regional, dan lokal, maka diupayakan pengembangan kawasan peribadatan.

Rencana Pengembangan Kawasan Peribadatan kurang lebih seluas 23 Ha, yang dilakukan pada Pengembangan Masjid Agung Al-Muwahiddin (Masjid Raya) dan Pusat Kajian Islam (*Islamic Centre*) yang berlokasi di Kelurahan Pane dan pengembangan masjid dan musholla di setiap kelurahan.

#### **11. Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan Pertahanan dan Keamanan atau lebih lazim disebut sebagai Kawasan militer yang ada di wilayah Kota Bima, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkantoran/administrasi, permukiman, dan latihan. Adapun kawasan militer yang ada di Kota Bima, seperti kawasan militer yang ada di Kelurahan Jatiwangi milik Angkatan Darat dan Kompi Brimob yang ada di Kelurahan Sambinae, serta kawasan militer lainnya yang berada di Kelurahan Sadia, Kelurahan Monggonao, dan Kelurahan Rabangodu Utara, adalah bertujuan untuk penegakan keamanan di Kota Bima.

Kawasan peruntukan militer hanya ditetapkan lokasinya, tidak untuk dikembangkan karena menyangkut kebijakan internal korps militer yang bersangkutan. Meskipun demikian, lahan bekas peruntukan kegiatan militer dapat digunakan dan dibangun peruntukan yang baru apabila kawasan militer tersebut sudah dipindahkan. Adapun lokasi rencana untuk kawasan militer dilakukan di Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Sadia, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Rabangodu Utara.

#### **12. Kawasan Peruntukan Pertanian**

Pengembangan Kawasan pertanian di Kota Bima meliputi kawasan: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan lokasinya menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bima dengan total luasan sebesar 2.253 Ha. Rencana luas kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan dengan pertimbangan utama untuk peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi wilayah Kota Bima. Pengembangan kawasan direncanakan dengan meningkatkan tingkat pelayanan dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Lahan pertanian tanaman pangan merupakan lahan pertanian dengan didukung irigasi baik teknis maupun nonteknis. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan kawasan pertanian lahan basah ditentukan pada kawasan yang saat ini sudah memiliki prasarana irigasi dan kemampuan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan

(padi). Kawasan pertanian tanaman pangan di Kota Bima meliputi: Kecamatan Mpunda seluas 303 Ha, Kecamatan Rasanae Timur seluas 463 Ha, Kecamatan Raba seluas 489 Ha, Kecamatan Asakota seluas 121 Ha.

Kawasan peruntukkan perkebunan seluas kurang lebih 3.632 Ha, dengan komoditi unggulan jambu mete dan kelapa yang tersebar pada Kelurahan Ntobo, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Nitu, Kelurahan Nungga, Kelurahan Lelamase, Kelurahan Lampe, Kelurahan Matakando, dan Kelurahan Kolo.

Kawasan peternakan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota dalam rangka mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS); dan pengelolaannya dilakukan dengan cara peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak. Adapun kawasan peternakan ini menyebar di semua kecamatan yang ada di Kota Bima dengan komoditi unggulan sapi.

### **13. Kawasan Peruntukan Perikanan**

Pengembangan kawasan perikanan tangkap, dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara. Sedangkan pengembangan perikanan budidaya, dilakukan di Kelurahan Dodu, Matakando, Nungga, Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi, dan Kelurahan Panggi.

#### **2.1.1.8. Kawasan Rawan Bencana**

Kota Bima merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh jalur cincin api sehingga potensi bencana gempa bumi sangat besar. Disamping rawan bencana gempa bumi, wilayah Kota Bima juga rawan bencana banjir yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Rasanae Barat, sebagian Kecamatan Mpunda, sebagian Kecamatan Raba, sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Rasanae Timur. Pada tahun 2016 terdapat 35 kelurahan yang terpapar bencana banjir bandang dari total 38 Kelurahan pada saat itu. Potensi bencana yang lain meliputi tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim serta bencana kebakaran yang berakibat timbulnya korban jiwa, harta, benda, kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Dan untuk menghindari atau meminimalkan korban jiwa akibat bencana yang terjadi maka disediakan ruang evakuasi, untuk memberikan ruang yang aman sebagai



tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk untuk sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/tsunami, bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir pada kawasan pinggir sungai berupa bangunan fasilitas umum, ruang serbaguna, kantor kelurahan dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana.
- b. Pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada kawasan pesisir pantai Kota di Paruga Nae dan Lapangan Sambinae.
- c. Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dilakukan pada: bagian timur (Kecamatan Rasanae Timur di Lapangan Lampe dan Lapangan Kodo, Kecamatan Raba di lapangan Pahlawan Raba serta bangunan lainnya yang memungkinkan untuk menampung korban bencana). Bagian tengah (Kecamatan Mpunda) di Lapangan SMK2, Lapangan Kantor Walikota Bima, dan bangunan sosial, serta bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana. Bagian barat (Kecamatan Rasanae Barat di Gedung Paruga Nae dan Stadion Manggemaci dan Kecamatan Asakota di Lapangan SPMA, bangunan sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana).

## **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **a. Pertumbuhan PDRB**

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 3,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 3,30 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 2,60 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 2,75 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama tahun 2017 Kota Bima mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,76 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya

produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 3,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 3,30 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bima.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bima pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan. Peranan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 24,14 persen (angka ini meningkat dari 22,57 persen pada tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,54 persen (turun dari 14,63 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,19 persen (turun dari 12,23 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,18 persen (turun dari 10,29 persen di tahun 2013) dan Konstruksi sebesar 9,07 persen.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, hanya kategori Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

**Tabel 2.13.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2013-2017**

Kategori	2013		2014		2015		2016		2017
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	336.300,89	15,44	375.446,07	14,06	419103,64	14,00	456132,74	13,82	493346,96
Pertambangan dan Penggalian	8.954,16	0,41	10339,67	0,39	11602,50	0,39	12360,28	0,37	14097,66
Industri Pengolahan	80.022,40	3,67	84973,46	3,18	92352,46	3,08	102837,40	3,12	110814,31
Pengadaan Listrik dan Gas	4.023,22	0,18	4453,68	0,17	4806,06	0,16	6189,54	0,19	6715,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	812,44	0,04	1.062,74	0,04	1133,97	0,04	1238,97	0,04	1348,72
Konstruksi	206.177,73	9,47	232528,23	8,71	262620,58	8,77	292775,06	8,87	330481,46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	483.862,68	22,22	611022,81	22,88	690154,42	23,05	776810,06	23,53	879770,47
Transportasi dan Perhubungan	233.209,92	10,71	271700,05	10,17	304326,98	10,16	334801,01	10,14	371197,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53.703,74	2,47	79856,60	2,99	91206,42	3,05	102539,52	3,11	113992,69
Informasi dan Komunikasi	38.284,13	1,76	44737,74	1,57	44737,74	1,49	49111,33	1,49	55619,45
Jasa Keuangan	50.203,07	2,31	62.667,71	2,35	68924,34	2,30	76959,25	2,33	88.943,55
Real Estate	109.062,67	5,01	146189,59	5,47	163474,41	5,46	179414,50	5,44	195907,11
Jasa Perusahaan	7.585,39	0,35	9669,24	0,36	10675,67	0,36	11676,75	0,35	12829,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	241.203,93	11,08	348307,37	13,04	395400,82	13,21	419257,39	12,70	444130,76
Jasa Pendidikan	167.086,93	7,67	210690,68	7,89	233738,97	7,81	260148,87	7,88	284562,99

Kategori	2013		2014		2015		2016		2017
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75.729,13	3,48	86765,99	3,25	94918,44	3,17	103274,42	3,13	111597,54
U Jasa lainnya	81.321,41	3,73	93521,26	3,50	104950,21	3,51	115182,20	3,49	129372,78
<b>PDRB</b>	<b>2.177.543,21</b>	<b>100</b>	<b>2.671111,92</b>	<b>100</b>	<b>2.994.127,63</b>	<b>100</b>	<b>3.300.709,27</b>	<b>100</b>	<b>3.644.728,72</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

**Tabel 2.14.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2013-2017**

Kategori	2014		2015		2016		2017	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	348728,89	3,70	362720,26	4,01	369630,11	1,91	386436,04	4,55
B Pertambangan dan Pengalihan	9541,55	6,36	10247,07	7,39	10883,88	6,21	11738,27	7,85
C Industri Pengolahan	83091,96	3,84	86266,01	3,82	91305,57	5,84	96369,39	5,55
D Pengadaan Listrik dan Gas	5624,75	39,81	5329,26	-5,25	6253,89	17,35	6472,08	3,49
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	839,68	3,35	860,19	2,44	899,57	4,58	949,13	5,51
F Konstruksi	219580,18	6,50	234125,70	6,62	253666,65	8,35	278069,38	9,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	519259,27	7,32	556890,99	7,25	601525,03	8,01	652960,52	8,55
H Transportasi dan	246169,98	5,56	260644,79	5,88	274880,23	5,46	295740,54	7,59
I Penyediaan Akomodasi dan Makan	57118,64	6,36	60993,37	6,78	65947,50	8,12	70367,02	6,70
J Informasi dan Komunikasi	40903,95	6,84	43826,09	7,14	47570,24	8,54	51356,84	7,96
K Jasa Keuangan dan Asuransi	53276,78	6,12	56675,02	6,38	60744,13	7,18	66562,90	9,58
L RealEstate	115390,71	5,80	122808,55	6,43	129988,46	5,85	137575,22	5,84
M,N Jasa Perusahaan	8106,89	6,87	8524,27	5,15	8979,99	5,35	9489,15	5,67

Kategori	2014		2015		2016		2017	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	253082,08	4,92	262778,38	3,83	269722,21	2,64	277004,71	2,70
P Jasa Pendidikan	177858,43	4,55	189031,70	6,45	200136,14	6,28	212677,87	5,87
Q Jasa Kesehatan dan Kgt Sosial	79558,07	5,06	83773,40	5,30	88707,45	5,89	93622,10	5,54
R,S,T,U Jasa lainnya	87701,70	7,85	92992,43	6,03	99127,45	6,60	107008,09	7,95
<b>PDRB</b>	<b>2305833,52</b>	<b>5,89</b>	<b>2438487,46</b>	<b>5,75</b>	<b>2579968,51</b>	<b>5,80</b>	<b>2754399,26</b>	<b>6,76</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan 2010, mencapai 2,75 trilyun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,58 trilyun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan infrastruktur. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama di sepanjang Jalan Sukarno Hatta dan perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 9,62 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbaikan infrastruktur akibat banjir bandang yang melanda Kota Bima pada akhir bulan Desember 2016. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sembilan persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari enam persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sembilan persen tersebut antara lain: lapangan usaha Konstruksi sebesar

9,62 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,58 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,55 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,96 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,95 persen, lapangan usaha Jasa Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,85 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan 7,59 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,70persen.

Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 6 (enam) persen adalah Lapangan usaha Real Estat sebesar 5,84 persen, Jasa Perusahaan tercatat sebesar 5,67 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,55 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,54 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,51 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,55 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas 3,49 persen, dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,70 persen.

**Tabel 1.15.**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut**  
**Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017**

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan	1,94	3,70	4,01	1,91	4,55
B Pertambangan	(5,10)	6,36	7,39	6,21	7,85
C Industri Pengolahan	5,18	3,84	3,82	5,84	5,55
D Pengadaan Listrik dan Gas	24,96	39,81	-5,25	17,35	3,49
E Pengadaan Air, Pengelolaan	1,84	3,35	2,44	4,58	5,51
Sampah Limbah dan Daur Ulang					
F Konstruksi	6,76	6,50	6,62	8,35	9,62
G Perdagangan Besar dan	9,28	7,32	7,25	8,01	8,55
Eceran; Reparasi Mobil dan					
H Transportasi dan	5,02	5,56	5,88	5,46	7,59
I Penyediaan Akomodasi dan	6,86	6,36	6,78	8,12	6,70
Makan Minum					
J Informasi dan Komunikasi	4,06	6,84	7,14	8,54	7,96
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,71	6,12	6,38	7,18	9,58

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
L RealEstate	6,00	5,80	6,43	5.85	5,84
M, Jasa Perusahaan	4,89	6,87	5,15	5,35	5,67
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	3,36	4,92	3,83	2,64	2,70
P Jasa Pendidikan	4,55	4,55	6,45	6,28	5,87
Q Jasa Kesehatan danKegiatan	4,38	5,06	5,30	5,89	5,54
R,S Jasa lainnya	7,54	7,85	6,03	6,60	7,95
<b>PDRB</b>	<b>5,58</b>	<b>5,89</b>	<b>5,75</b>	<b>5,80</b>	<b>6,76</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

\*) Angka Sememtara ; \*\*) Angka Sangat Sementara

### b. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk.

Nilai PDRB perkapita Kota Bima atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB perkapita tercatat sebesar 15,5 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 21,90 juta rupiah (lihat tabel 11). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 2.16.**  
**PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2013-2017**

<b>Nilai PDRB (Milliar Rupiah)</b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
- ADHB	2.37	2.67	2.99	3.30	3.64
- ADHK					

<b>PDRB perKapita(RibuRupiah)</b>					
- ADHB	15.50	17.07	18.74	20.23	21.90
- ADHK	14.23	14.74	15.26	15.81	16.55
- PertumbuhanPDRB per Kapita ADHK 2010/	3,3 0	3,6 6	3,5 4	3,6 2	4,6 4
<b>JumlahPenduduk (ribu orang)</b>	153,	156,	159,	163,	166,
<b>PertumbuhanJumlahPenduduk</b>	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

### c. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah kestabilan harga-harga. Harga yang merupakan hasil interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang dan jasa yang beredar di masyarakat, perlu dipantau perkembangannya sebagai salah satu indikator penentu kebijakan pemerintah di bidang pendapatan, fiskal maupun moneter. Untuk memperoleh gambaran mengenai kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu dilakukan dengan menghitung indeks harga konsumen. Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode.

Nilai inflasi yang terlalu tinggi akan mendorong turunnya investasi, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang dan dengan sendirinya semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Laju inflasi yang tidak terlalu tinggi akan membuat stabilitas tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergulir.

Selama periode 2013-2017 laju inflasi tahun kalender Kota Bima mengalami perkembangan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,06 persen diikuti tahun 2014 sebesar 7,16 persen. Pada tahun 2015 laju inflasi Kota Bima sudah rendah, yaitu 4,29 persen dan terus turun hingga mencapai titik terendahnya selama periode 2013-2017 yaitu di tahun 2016 pada angka 3,10 persen yang kemudian sedikit naik menjadi 4,04 persen pada tahun 2017.



**Tabel 2.17.**  
**Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013-2017 Kota Bima**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bima	10,06	7,16	4,29	3,10	4,04

*Sumber : BPS Kota Bima, 2018*

### **2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

#### **a. Pendidikan**

##### **1. Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mencerminkan seberapa lama masyarakat yang berusia 7 tahun di suatu wilayah memiliki harapan untuk bersekolah. Harapan lamanya penduduk Kota Bima untuk bersekolah sejak tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk bersekolah selama 14,70 tahun, berbeda dengan di tahun 2017 dimana penduduk Kota Bima telah memiliki harapan untuk bersekolah selama 14,97 tahun atau hampir 15 tahun. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan HLS Kota Bima sebesar 1,84 persen selama periode 2013-2017. Peningkatan sebesar 1,84 persen juga berarti terjadi peningkatan harapan lama bersekolah selama 1 bulan lebih setiap tahunnya.

**Tabel 2.18.**  
**Harapan Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bima	14,70	14,92	14,95	14,96	14,97
Provinsi NTB	12,46	12,73	13,04	13,16	13,46

*Sumber : BPS Kota Bima, 2018*

Penduduk usia 7 tahun Kota Bima memiliki harapan lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata penduduk usia 7 tahun Provinsi NTB. Pada tahun 2013, penduduk usia 7 tahun Kota Bima memiliki harapan untuk bersekolah selama 14 tahun atau sudah lewat dari pendidikan Diploma 1, sementara rata-rata penduduk usia 7 tahun di Provinsi NTB hanya memiliki harapan lama bersekolah selama 12 tahun atau setara dengan tamat SMA. Selanjutnya, pada tahun 2017 angka HLS Kota Bima hampir mencapai angka 15 tahun yang berarti penduduk usia 7 tahun Kota Bima telah memiliki harapan untuk bersekolah sampai ke jenjang pendidikan Diploma 3, berbeda dengan rata-rata penduduk usia 7 tahun Provinsi NTB yang hanya memiliki harapan untuk bersekolah selama 13 tahun atau setara Diploma 1.

Kota Bima sendiri memiliki angka HLS dengan peringkat kedua di Provinsi NTB setelah Kota Mataram. Sejak tahun 2013 baik Kota Mataram maupun Kota Bima mengalami peningkatan angka HLS. Meskipun begitu, terlihat perbedaan kecepatan tumbuh dari HLS Kota Mataram dan Kota Bima. Selisih HLS Kota Mataram dan Kota Bima di tahun 2013 hanya sebesar 0,12 tahun, sementara di tahun 2017 selisihnya sudah mencapai 0,54 tahun. Artinya, dalam 5 tahun terakhir Kota Mataram lebih cepat tumbuh setengah tahun dibandingkan dengan Kota Bima. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan yang ada di kedua kota. Kota Mataram memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai dibandingkan dengan Kota Bima sehingga Kota Mataram terus mengalami peningkatan harapan lama sekolah yang lebih tinggi.

## 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Sejalan dengan kondisi HLS, rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bima selama periode 2013-2017 selalu lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi NTB. Sejak tahun 2013, penduduk Kota Bima telah bersekolah dengan rata-rata lama bersekolah 9,46 tahun. Angka 9,46 ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTB yang hanya sebesar 6,54 di tahun yang sama. Selanjutnya, pada tahun 2017 Kota Bima telah berhasil memperpanjang rata-rata lama sekolahnya dengan

berbagai program pengembangan bidang pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun menjadi sebesar 10,14 tahun.

**Tabel 2.19.**  
**Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2013-2017**

Rata-Rata Lama Sekolah	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bima	9,46	9,58	9,96	10,13	10,14
Provinsi NTB	6,54	6,67	6,71	6,79	6,90

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

### 3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

**Tabel 2.20.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2013-2017**

No	Angka Partisipasi Murni	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	94,37	100,56	96,66	97,88	99,7
2	SMP/MTs	116,69	117,08	117,52	105,12	94,63
3	SMA/MA/SMK	117,22	94,38	105,02	116,18	75,14

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 (diolah)

### 4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 2.21.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017 Kota Bima**

No	Angka Partisipasi Kasar	2013	2014	2015	2016	2017
1.	APK SD/MI (%)	104,13	108,75	97,64	98,87	116,05
2.	APK SMP/MTs (%)	166.41	158,73	118.70	106.18	98,04
3.	APK SMA/MA/SMK (%)	142,31	119,09	106,08	117,35	101,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018 (diolah)

#### 5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

**Tabel 2.22.**  
**Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Orang) Tahun 2013-2017**

No	Tingkat Pendidikan	Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa)				APT (%)			
		2013	2014	2015*)	2016*)	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	2.730	2.710	2.813	2.949	1,74	1,66	2,04	2,12
2.	SMP/MTs	2.901	2.878	2.990	2.831	1,85	1,76	2,17	2,03
3.	SMA/MA/SMK	7.749	1.946	3.190	3.364	4,94	1,19	2,31	2,41
Jumlah Penduduk		156.820	163.337	137.851	139.366				

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 (diolah)

Ket : \*) Jumlah Penduduk versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

## **b. Kesehatan**

### 1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Bima selama kurun tahun 2012–2016 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2012, AKB di Kota Bima tercatat sebesar 9,27 per 1.000 KH. Pada tahun 2014 AKB di Kota Bima turun menjadi 5,75 per 1.000 KH, dan terus turun menjadi 5,14 per 1.000 KH pada tahun 2015, akan tetapi pada tahun 2016 naik menjadi 7,42 per 1000 KH. Artinya, terjadi peningkatan angka kematian bayi di Kota Bima dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

**Tabel 2.23.**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2012-2016**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kematian Bayi (Berumur <1 Tahun)		19 KSS	17 KSS	25 KSS	6 KSS
Jumlah Kelahiran Hidup		3.306	3.306	3.370	
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	9,3	5,75	5,14	7,42	2,32

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2017 (diolah)*

### 2. Angka Harapan Hidup

Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan usia hidup yang telah ditetapkan oleh UNDP adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka ini memperkirakan lama hidup rata-rata penduduk sejak dilahirkan, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Penghitungan AHH dilakukan dengan metode tidak langsung, dari keterangan anak lahir hidup dan anak masih hidup pada suatu kurun waktu tertentu. Dengan menggunakan tabel kematian, AHH dapat diperoleh untuk penduduk pada tahun tertentu. Perhitungan AHH masih menggunakan metode tidak langsung karena

pelaksanaan registrasi vital yang menyangkut perubahan aktivitas vital penduduk (kelahiran, kematian, dan migrasi) belum dilakukan secara optimal di Indonesia.

Keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup penduduk di bidang kesehatan dapat terlihat dari peningkatan AHH Kota Bima dari tahun ke tahun pada periode 2013-2017. Pada tahun 2013, penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk dapat hidup selama hampir 68,88 tahun. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 2017 penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk hidup sampai usia hampir 69,58 tahun. Dengan kata lain, terjadi peningkatan AHH Kota Bima sebesar hampir 3 persen selama 5 tahun atau jika diubah dalam satuan waktu AHH Kota Bima meningkat sebesar kurang lebih 3 bulan per tahunnya.

**Tabel 2.24.**  
**Angka Harapan Hidup Kota Bima**

AHH	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bima	68,88	69,03	69,12	69,35	69,58
NTB	64,74	64,90	65,38	65,48	65,55

*Sumber : BPS Kota Bima, 2018*

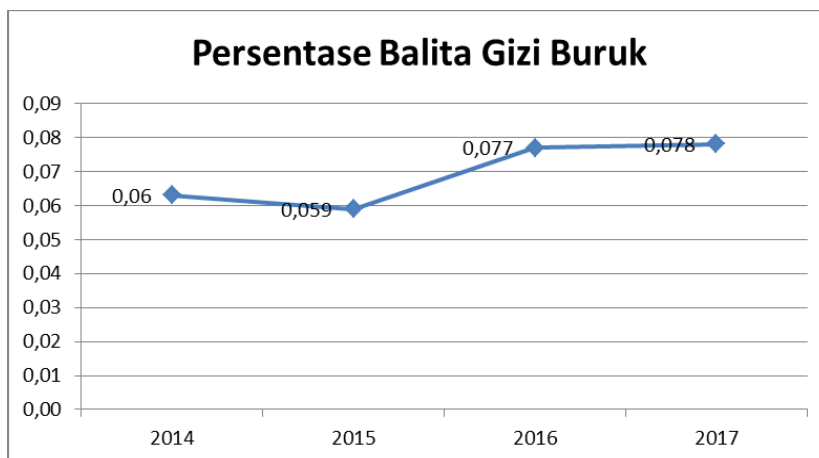
### 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).

Data Dinas Kesehatan Kota Bima menyebutkan bahwa dari jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Bima pada tahun 2017 adalah sebanyak 13 kasus gizi buruk dari 13.601 balita. Sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah kasus sebanyak 15 kasus dari 14.089 balita.

Persentase balita gizi buruk diperoleh dari membandingkan jumlah balita gizi buruk yang terjadi pada periode tertentu dengan Jumlah balita yang ada pada periode yang sama.

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 0,078 dari target 0,075. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, Persentase balita gizi buruk di Kota Bima tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,059 % dari target 0,085%, dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,077% dari target 0,080. hal ini menunjukan tingkat keberhasilan program dalam rangka menekan kejadian kasus gizi buruk yang ada di Kota Bima masih kurang. Demikian pula jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2018 sebesar 0,070%, capaian Dinas Kesehatan Kota Bima masih sekitar 0,05% yang harus dipenuhi. Adapun Angka kematian bayi di Kota Bima Tahun 2014 s/d 2017 dapat dilihat pada gambar berikut:



Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program yaitu adanya kegiatan penjangkaran kasus secara bekal, surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kelas gizi di puskesmas. Program lain yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi kurang, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-ASI, pemberian biaya perawatan gizi buruk, diskusi refleksi kasus gizi buruk rakorcam tentang hasil penimbangan balita.

Penyebab masih terjadinya kasus gizi buruk di Kota Bima ada 2 hal yaitu asupan gizi dan penyakit infeksi. Asupan gizi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, daya beli, tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi ibu. Sedangkan Infeksi dipengaruhi oleh hygiene dan sanitasi serta pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.25.**

**Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2014 - 2017**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi</b>
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2014	0,060 %
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2015	0,059 %
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2016	0,077 %
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2017	0,078 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2018

**c. Kemiskinan**

Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Bima pada tahun 2017 sebesar 9,27%, mengalami penurunan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 9,51%. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah di Provinsi NTB dan berada di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, kalau dilihat dari sebaran penduduk miskin dalam wilayah Kota Bima, Kecamatan RasanaE Timur yaitu sebesar 14,86%, sedangkan kecamatan yang terendah tingkat kemiskinannya adalah kecamatan RasanaE Barat dengan tingkat tingkat kemiskinan sebesar 2,52% yang merupakan kawasan sentra perdagangan di Kota Bima.

Secara umum, perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Bima dari tahun ke tahun semakin membaik, walaupun pada tahun 2015 mengalami kenaikan namun pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa capaian hasil-hasil pembangunan semakin efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

**Tabel 2.26.**

**Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2013- 2017**

<b>Kota Bima</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	17.362	16.412	15.734	15.511	15.134
Tingkat Kemiskinan (%)	9,91	9,74	9,85	9,51	9,27

Sumber : TKPKD Kota Bima, 2018



### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **a. Urusan Pendidikan**

Gambaran umum kondisi layanan urusan wajib bidang pendidikan di Kota Bima akan mencakup keadaan yang meliputi tinjauan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Disamping itu juga akan mencakup tinjauan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk, rasio guru dengan murid, rasio guru dengan murid per kelas rata-rata serta sebaran bangunan sekolah berdasarkan kecamatan.

##### **1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. APS di Kota Bima adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.27.**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Bima**  
**Tahun 2013-2017**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.	APS SD/MI	97,64	100,55	97,64	98.43	99,70

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
2.	APS SMP/MTs	<b>103,96</b>	<b>116,59</b>	<b>118,70</b>	99,30	99,30

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

## 2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Hal yang penting dalam rangka pembangunan dan pelayanan umum urusan wajib bidang pendidikan adalah mengetahui apakah bangunan sekolah yang ada sekarang telah memenuhi standar dan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah tingkat pendidikan (dasar dan menengah). Untuk itu perlu diketahui rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

**Tabel 2.28.**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Bima**  
**Tahun 2013-2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	85	90	94	94	94
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	19.154	19.151	19.154	17.577	18.256
1.3.	Rasio	225	213	204	187	194
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	31	32	38	38	38
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7.892	7.892	7.892	9.050	9.134
2.3.	Rasio	255	247	207	238	240

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Dari tabel tersebut diatas bahwa penduduk usia sekolah pendidikan 7-12 tahun (SD/MI) pada 2017 perbandingan satu gedung sekolah menampung 194 orang, kemudian pada penduduk usia sekolah 13-15 tahun (SMP/MTs) perbandingan satu sekolah menampung 240 orang.

### 3.Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

**Tabel 2.29.**  
**Rasio Guru/Murid Sekolah Negeri di Kota Bima 2013-2017**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	1.936	1.947	2.066	2.015	2.015
1.2.	Jumlah Murid	15.945	16.301	15.178	15.178	14.317
1.3.	Rasio	8,24	8,37	7,35	7,53	7,11
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	1.107	1.266	788	741	855
2.2.	Jumlah Murid	5.133	5.382	5.306	5.641	5.474
2.3.	Rasio	4,64	4,25	6,73	7,16	6,41

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

**Tabel 2.30.**  
**Rasio Guru/Murid Madrasah Negeri di Kota Bima 2013-2017**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	MI					
1.1.	Jumlah Guru	46	48	46	49	49
1.2.	Jumlah Murid	711	733	764	770	778
1.3.	Rasio	15,46	15,27	16,61	15,71	15,88
2	MTs					

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
2.1.	Jumlah Guru	182	208	104	140	202
2.2.	Jumlah Murid	1.825	2.064	2.016	1.929	2.221
2.3.	Rasio	10	9,92	19,38	13,77	11

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

#### 4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

**Tabel 2.21.**

**Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-rata per 1000 Jumlah Murid di Kota Bima Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah ruang kelas jenjang SD/MI	774	852	768	732	723
Jumlah ruang kelas jenjang SMP/MTs	334	371	370	408	372
Total jumlah ruang kelas pendidikan dasar	1.108	1.223	1.138	1.240	1.095
Jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar	4.066	4.820	3.806	3.740	3.851
Rata-rata jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas	3,67	3,94	3,34	3,02	3,51
Jumlah murid jenjang pendidikan dasar	33.078	33.354	28.070	26.988	21.589
Rata-rata jumlah murid pendidikan dasar per kelas	29,85	27,27	24,67	21,76	19,71
Rasio guru per kelas rata-rata per 1.000 jumlah murid	0,111	0,118	0,119	0,112	0,163

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018*

## **b. Urusan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan adanya kegiatan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang paling mendasar untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesehatan bisa dilihat dari capaian indikator angka usia harapan hidup, yang dihitung menggunakan variabel angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Jumlah kematian bayi dalam 5 tahun terakhir terus menurun pada kisaran 19 kasus pada tahun 2013 sampai dengan 6 kasus pada tahun 2017. Capaian ini cukup akseleratif untuk mendukung pencapaian indikator usia harapan hidup. Pelayanan ibu hamil hingga melahirkan telah berhasil menekan angka kematian bayi meskipun masih cukup banyak kasus kematiannya. Kasus Kematian Ibu juga terus menurun selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu mencapai 10 kasus.

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, Kesiapsiagaan Kelurahan Siaga yang ada memiliki kontribusi yang positif.

Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program pengembangan desa siaga yang sudah dimulai tahun 2006. Pengembangan Kelurahan siaga aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan. Pelaksanaan pengembangan Kelurahan Siaga di Kota Bima sampai dengan tahun 2017 tercatat dari 38 kelurahan, 36 diantaranya telah mengembangkan Kelurahan siaga aktif.

**Tabel 2.32**  
**Perkembangan Pelayanan Kesehatan Kota Bima tahun 2013-2017**

No.	Urusan Kesehatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Kematian Bayi	19 kss	19 kss	17 kss	25 kss	6 kss
2.	Angka Kematian Ibu AKI)	198,7/ 100.00 0 KH	75/100 000KH	151/1 00000 KH	87/10 0000K H	148/1 00000 KH
3.	Persentase Kelurahan STBM	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase sarana Pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	50%	60%	60%	60%	60%
5.	Persentase penduduk miskin penerima kartu Jaminan Kesehatan 'JUJUR SEHATI'	65%	100%	100%	74%	100%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2%	60%	93%	95%	95%
7.	% Desa Siaga Aktif	75%	84%	89%	94%	98%
8.	% Pembinaan Sekolah Sehat	15 sklh	17 sklh	18 sklh	20 sklh	20 sklh
9.	% Puskesmas	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
10.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	109.13 %	100.00 %	103.88 %	111.41 %	114.42 %
11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga	85.98%	91.04%	91.81 %	83.00 %	83.00 %

	kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan					
12.	Cakupan kunjungan ibu hamil ( K4)	92.42%	98.27%	96.74 %	88.71 %	88.71 %
13.	Cakupan peserta KB aktif	28.30%	82.74%	82.56 %	87.74 %	87.74 %
14.	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN3)	89.52%	93.02%	94.91 %	99.13 %	99.13 %
15.	Cakupan Kunjungan Bayi	89.47%	94.43%	94.66 %	86.16 %	86.16 %
16.	Cakupan Kunjungan Balita	71.35%	72.39%	81.79 %	73.41 %	73.41 %

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2018*

Strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus khusus pada ibu dan anak dapat dilakukan pada Posyandu. Analisis rasio Posyandu terhadap jumlah balita perlu dilakukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pada kondisi ideal, satu Posyandu melayani 100 balita. Artinya, minimal terdapat 10 Posyandu per 1000 balita.

Untuk kondisi di Kota Bima, rasio ketersediaan Posyandu terhadap balita terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2013, satu Posyandu telah mampu melayani 118 balita, sedangkan pada tahun 2017 jumlah pelayanan Posyandu meningkat terus, sehingga perbandingan satu posyandu hanya melayani 91 balita, artinya perbandingan rasio posyandu dengan jumlah balita telah terpenuhi.

**Tabel 2.33.**  
**Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kota Bima**  
**Tahun 2013 – 2017**

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
----	-----------	------	------	------	------	------

		posyandu	Balita	posyandu	Balita	posyandu	Balita	posyandu	Balita	posyandu	Balita
1	Kecamatan Rasanae Barat	32	4.219	32		32		32		32	
2	Kecamatan Rasanae Timur	26	2.196	26		26		26		26	
3	Kecamatan Mrunda	35	4.406	35		35		35		35	
4	Kecamatan Raba	40	4.723	40		40		40		40	
5	Kecamatan Asakota	30	3.784	30		30		30		30	
	Jumlah	163	19.329	163		163		163		163	

*Sumber : Kota Bima Dalam Angka dan Dinas Kesehatan, 2018*

Puskesmas adalah sarana pelayanan dasar dan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan harus mampu dijangkau dan diakses oleh masyarakat secara luas dan mudah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah dengan mengetahui rasio puskesmas per 100.000 penduduk.

Sampai dengan tahun 2017, puskesmas di Kota Bima adalah sejumlah 5 (lima) unit yang tersebar secara merata di 5 kecamatan dan didukung oleh 19 puskesmas pembantu.

Sampai dengan tahun 2017, rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah berupa RSUD Bima pengelolaannya masih dibawah Pemerintah Kabupaten Bima meskipun lokasinya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Bima. Sedangkan yang dikelola oleh swasta masih dalam bentuk klinik yaitu PKU Muhammadiyah dan RS. Dr. Agung, Klinik Husada dan RS. Stikes.

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia



belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

**Tabel 2.34.**  
**Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013 – 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Dokter				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kecamatan Rasanae Barat	13	16	12	15	12
2	Kecamatan Rasanae Timur	0	0	0	0	0
3	Kecamatan Mpunda	23	20	21	25	27
4	Kecamatan Raba	26	29	24	25	30
5	Kecamatan Asakota	4	8	2	3	6
Jumlah		66	73	59	68	75

Sumber: Dinas Kesehatan diolah, 2017

### c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah.

Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, hingga tahun 2017 di Kota Bima telah dibangun jalan sepanjang 311,425 km yang terdiri dari 33,13 km Jalan Negara dan 20,19 km Jalan Provinsi serta 258,105 Jalan Kota. Dari total panjang Jalan Kota, 76,18% dalam kondisi baik sedangkan sisanya sebesar 23,82 persen kondisi jalan masih kategori rusak ringan maupun rusak berat.

**Tabel 2.35**  
**Kondisi Jalan Kota Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013 - 2017**

<b>Kondisi Jalan (km)</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Aspal	139,58	146,11	149,81	153,83	165,83
Tidak di aspal	64,76	58,23	108,30	104,28	92,3
Baik	123,93	125,93	160,82	109,06	145,49
Sedang	27,94	24,15	30,23	60,10	51,13
Rusak	30,85	32,24	36,79	40,69	26,13
Rusak Berat	21,63	22,03	30,28	48,26	35,36

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, 2018

Panjang jalan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 panjang jalan dalam kondisi baik 123,93 km naik menjadi 145,49 km pada tahun 2017. Panjang jalan kondisi sedang dari 27,94 km bertambah menjadi 51,13 km. Sedangkan panjang jalan dalam kondisi rusak mengalami penurunan yaitu dari hanya 30,85 km pada tahun 2013 menjadi hanya 26,13 km pada tahun 2017. Adapun panjang jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 21,63 km naik menjadi 35,36 km pada tahun 2017. Terjadinya peningkatan panjang jalan dalam kondisi berat dan kondisi rusak berat ini dikarenakan terdapat pembukaan ruas jalan baru dalam beberapa tahun terakhir khususnya jalur jalan ekonomi yang mengarah ke perbukitan dan gunung-gunung.

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Pada tahun 2017, rasio pelayanan jaringan irigasi di Kota Bima baru mencapai angka 24,78.

**Tabel 2.36.**  
**Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jaringan primer (meter)					9.631
2.	Jaringan Sekunder (meter)					36,841

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
3.	Jaringan Tersier (meter)					-
4.	Luas lahan budidaya (Ha)					2.420
	Rasio					19,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, Bidang SDA 2018

**Tabel 2.37**  
**Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan tahun 2013 - 2017**

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasanae Barat					-
2	Mpunda					37
3	Raba					13,78
4	Rasanae Timur					19,28
5	Asakota					26,82
	Kota Bima					19,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang SDA, 2017

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan pembuangan sampah.

**Tabel 2.38**  
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Bima Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	28.632	29.102	30.695	31.868	33.420
2.	Jumlah rumah tinggal	37.187	39.020	39.842	40.681	41.506
3.	Persentase (%)	76,99	74,58	77,04	78,33	80,51

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Dalam bidang pelayanan air minum, penduduk Kota Bima yang memiliki akses air minum pada tahun 2017 mencapai 93,25%.

**Tabel 2.39**  
**Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk yang berakses air Minum (Jiwa)	130.834	137.912	141.577	150.173	155.174
Jumlah penduduk (Jiwa)	148.645	156.400	155.281	163.101	166.407
Persentase penduduk berakses air minum (%)	88,01	88,18	91,17	92,07	93,25

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2018

**Tabel 2.40**  
**Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013 - 2017**

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kecamatan Rasanae Barat					91,18
2	Kecamatan Rasanae Timur					90,35
3	Kecamatan Mpunda					92,91
4	Kecamatan Raba					90,74
5	Kecamatan Asakota					94,76

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2018

Secara umum kinerja pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kurun waktu 2013 – 2017 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.41**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bima Tahun 2013-2017**

No	URUSAN PEKERJAAN UMUM	2013	2014	2015	2016	2017
1.	panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik (%)	53,00	61,63	67,16	72,01	76,18
2.	Rasio Jaringan Irigasi Teknis	43,00	0,49	0,51	0,55	0,72
3.	Persentase Jaringan Irigasi Teknis (%)	43,00	48,75	51,20	54,53	71,74
4.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	70,00	76,21	80,87	87,19	93,25
5.	Rumah tangga bersanitasi layak (%)	71,00	74,92	76,50	80,23	87,23
6.	luas permukiman kumuh (%)	10,33	3,3	3,43	8,17	6,03
7.	luas kawasan tepian air ( <i>waterfront city</i> ) yang tertata (%)	1,00	10,00	14,23	27	33
8.	konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi (%)	96,98	96,98	96,98	100,51	101,45
9.	Penerangan Jalan Umum yang berfungsi baik (%)	45,00	45,00	45,00	79,64	100,00
10.	Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase (%)	27,00	27,86	36,20	43,99	57,03
11.	Panjang Sungai Tertangani (%)	12,60	43,97	45,92	47,26	50,89
12.	Luas Wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang (%)	20,00	20	20	20	20
13.	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	22,31	4,31	4,81	5,20	5,54

Sumber: Dinas PUPR Kota Bima, 2018

Pada bidang penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikatornya yaitu dengan tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031, telah terealisasi.

Adapun sistem perkotaan menurut Perda Nomor 4 Tahun 2012, yaitu menyebutkan bahwa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Bima; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Bima; Sub Pusat Kota berada di Mpunda dan Raba.